



**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : 11
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 25 Maret 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : Membahas permasalahan kasus tanah.
Ketua Rapat : **Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI.**
Sekretaris Rapat : Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir : A. 6 Anggota Komisi II DPR RI
B. Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN
C. Direktur Humas dan Hukum Dirjen Kekayaan Kementerian Keuangan
D. Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
E. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara
F. Kakan BPN Jakarta Pusat
G. Kakan BPN Jakarta Barat
H. Kakan BPN Jakarta Timur
I. Forum Masyarakat Sarirejo
J. Forum Warga RW 09 Kemayoran
K. Forum Warga RW 08 Ancol
L. Kuasa Ahli Waris Alm. Paul Hamdoko

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN, Direktur Humas dan Hukum Dirjen Kekayaan Kementerian Keuangan, Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kakanwil BPN Sumatera Utara, Kakan BPN Jakarta Pusat, Kakan BPN Jakarta Barat, Kakan BPN Jakarta Timur, Forum Masyarakat Sarirejo, Forum Warga RW 09 Kemayoran, Forum Warga RW 08 Ancol, Kuasa Ahli Waris Alm. Paul Hamdoko, Membahas permasalahan kasus tanah pada hari Senin, 25 Maret 2019, dibuka pada pukul 10.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN RI Cq Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah untuk melakukan percepatan penanganan sengketa lahan dan menyelesaikan sengketa yang sudah bisa diselesaikan.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk memetakan wilayah yang teridentifikasi sebagai wilayah konflik pertanahan dan ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian BUMN dan Pelindo agar segera menyelesaikan permasalahan SHPL No. 7/Ancol berdasarkan SK 128/HPL/DA/86 tanggal 17 Desember 1986.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk menindaklanjuti penyelesaian permasalahan sengketa tanah Sari Rejo Medan, warga RW 09 Kemayoran, tanah Alm Paul Handoko dan PT Taman Griya Kencana yang terletak di Jakarta Barat dengan mengundang para pihak terkait.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

Jakarta, 25 Maret 2019
KETUA RAPAT

ttd

IR. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
A-345

